PERKEMBANGAN ASET DUNIA USAHA BERBADAN HUKUM KOPERASI DI KOTA TERNATE

Muhammad Kamal (kamalcobodoe@gmail.com)
Arif Ismail (arifismailtte@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah Badan Usaha Koperasi dan perolehan kredit oleh bisnis koperasi berpengaruh terhadap akumulasi aset koperasi di Kota Ternate. Alat analisis yang digunakan adalah metode Regresi Linear Berganda.

Hasil penelitian menunjukan bahwa, variabel jumlah badan usaha koperasi di Kota Ternate berpengaruh terhadap peningkatan asset badan usaha koperasi. Meningkatnya badan usaha koperasi merupakan wujud dari semangat masyarakat Kota Ternate untuk menjadikan koperasi sebagai wadah untuk melakukan kegiatan ekonomi. Wadah-wadah ini berfungsi untuk melindungi, membina dan menggerak potensi pelaku-pelaku ekonomi yang terhimpun sebagai anggota koperasi. Selain itu variabel Pinjaman dana pada bank-bank dan pengelolaan dana bergulir BUMN secara berhati-hati oleh badan usaha koperasi untuk kebutuhan pembiayaan dan ekspansi bisnis koperasi di Kota Ternate mampu mendorong peningkatan nilai asset badan usaha koperasi. Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah permodalan yang paling klasik selain mengandalkan sumber dana dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota maka koperasi dapat mengatasinya dengan melakukan pinjaman pada lembaga perbankan atau mengelola dana bergulir yang disediakan oleh BUMN dengan kesepakan yang saling menguntungkan antara badan usaha koperasi dan BUMN. Sarana ini menjadi sebuah pendorong yang cukup kuat dalam meningkatkan nilai asset koperasi di Kota Ternate.

Kata Kunci: Aset, Koperasi

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of the number of Cooperative Business Entities and the acquisition of credit by cooperative businesses on the accumulation of joint assets in Ternate City. The analysis tool used is the Multiple Linear Regression method.

The research results show that the variable number of cooperative business entities in Ternate City affects increasing the assets of unified business entities. The increase in suitable business entities manifests the enthusiasm of the people of Ternate City to make cooperatives a forum for carrying out economic activities. These platforms function to protect, develop, and mobilize the potential of economic actors who are members of cooperatives. Apart from that, the variables of loan funds from banks and careful management of BUMN revolving funds by cooperative business entities for financing needs and suitable business expansion in Ternate City can encourage an increase in the asset value of appropriate business entities. As one solution to overcome the most classic capital problems, apart from relying on funding sources from principal savings and mandatory member savings, cooperatives can be solved by making loans to banking institutions or managing revolving funds provided by BUMN with mutually beneficial agreements between the cooperative business entity and BUMN. This facility is a strong driver in increasing the value of suitable assets in Ternate City.

Keyword: Aseet, Cooperative

PENDAHULUAN

Koperasi dalam ekonomi masyarakat menjadi wadah ekonomi yang berjiwa sosial, yang dapat mengembangkan ekonomi masyarakat melalui potensi-potensi ekonomi anggota dan non anggota, menyediakan lapangan pekerjaan melalui unit-unit usaha bisnis yang dikembangkannya, sebagai wadah pendidikan dan pembinaan semangat kewirausahaan anggotanya dan masyarakat, melayani kebutuhan-kebutuhan anggotanya. Misi koperasi seyogyanya lebih menyentuh pada masyarakat akar rumput karena visi sosial koperasi adalah meningkatkan nasib ekonomi sosialnya masyarakat ekonomi lemah yang lebih banyak termarginalkan akibat keterbatasan mereka dalam mengakses sumber daya dalam masyarakat. Terlebih lagi, keterbatasan itu berhubungan dengan derasnya persaingan ekonomi dalam budaya masyarakat kapitalis yang cenderung dengan semangat mengejar keuntungan individu.

Merujuk pada kerangka berpikir seperti ini maka penguatan peran koperasi harus dilakukan pada berbagai lini organisasi koperasi. Diantara yang terkait hal itu adalah lini bisnisnya. Dalam dunia bisnis koperasi kita akan menghadapi sebuah fakta yang berangkat dari konsepsi dasar koperasi itu sendiri yakni bahwa koperasi bukanlah merupakan organisasi yang berbasis kumpulan modal melainkan organisasi berbasis kumpulan orang-orang. Olehnya itu, koperasi memiliki tantangan besar untuk mengubah persepsi sebagai lembaga berhimpunnya kepentingan-kepentingan anggota yang kemudian mengganggu sistem bisnisnya koperasi. Persepsi seperti ini harus diubah menjadi suatu kerangka berpikir yang produktif bahwa antara kepentingan anggota dengan bisnis koperasi merupakan dua hal yang saling menunjang dan saling membesarkan.

Hubungan yang saling menguatkan antara kepentingan anggota dengan bisnis koperasi mengharuskan adanya kekuatan yang dapat mendorong bisnis koperasi itu sehingga menjadi sandaran dalam menggerakan usaha koperasi. Salah satu kekuatan utama untuk menjadi sandaran dalam usaha koperasi itu adalah kepemilikan asset usaha yang sehat dan produktif. Asset yang sehat tercermin pada kemampuannya sebagai harta kekayaan koperasi yang bukan merupakan barang-barang jaminan terhadap hutang-hutang koperasi kepada pihak ketiga. Sedangkan asset produktif menunjukan kualitas fisik maupun kuantitas yang dapat dioperasikan untuk kegiatan produksi semua jenis unit usaha koperasi.

Peran koperasi di Kota Ternate dapat ditunjukan dengan berapa indikator penting diantaranya adalah sebagai berikut: sampai pada tahun 2018 jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di Kota Ternate sebanyak 14 Badan Hukum (BH), koperasi Non KUD 35 BH, Koperasi Karyawan (KOPKAR) 10 unit BH dan jenis Badan Hukum koperasi lainnya sebanyak 157 BH koperasi. Sehingga jumlah total Badan Hukum organisasi koperasi di Kota Ternate pada tahun 2018 sebanyak 216 Badan Hukum. Berdasarkan indikator jumlah anggota koperasi yang tercatat adalah

sebanyak 12.948 orang yang terdiri atas 7.162 adalah laki-laki dan 5.785 adalah perempuan. Berdasarkan rilis laporan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara tercatat nilai volume usaha koperasi pada tahun 2017 mencapai Rp 190.672.798.000,-.

Dengan indikator tersebut berarti bahwa kontribusi koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat dalam mendorong ekonomi masyarakat di Kota Ternate betul-betul nyata.Dalam bentuk badan hukum lainnya keberadaan koperasi teridentivikasi melalui banyaknya badan hukum koperasi siswa di semua sekolah jenjang SLTP sampai SLTA yang ada di Kota Ternate, koperasi pengawai yang ada pada semua dinas di Kota Ternate, dan koperasi simpan pinjam yang beroperasi di pasar di Kota Ternate.

Jumlah Badan Hukum koperasi yang demikian banyak di Kota Ternate memperlihatkan bahwa semangat warga masyarakat Kota Ternate yang cukup tinggi dalam menggunakan wadah koperasi sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Pilihan masyarakat menggunakan koperasi sebagai wadah dalam melakukan kegiatan ekonomi karena koperasi memiliki keunggulan dengan menghimpun partisipasi anggota dengan tanpa terlalu menonjolkan akumulasi modal yang besar. Sehingga koperasi dirasa cocok untuk dijadikan wadah dalam melakukan aktifitas ekonomi. Bagi sebagian warga masyarakat Kota Ternate menjadi anggota koperasi dan melaksanakan kegiatan usaha melalui wadah koperasi tidak membutuhkan dana yang besar. Proses legalitas usaha menjadi lebih mudah dan murah.

Adapun Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah menganalisis pengaruh jumlah Badan Usaha Koperasi dan perolehan kredit oleh bisnis koperasi berpengaruh terhadap akumulasi aset koperasi di Kota Ternate.

LITERATURE REVIEW

Pengertian Koperasi

Menurut R.S. Soerja A. dalam Hendrojogi, (2012), koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang berdasarkan persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak membedakn haluan agama atau politik dengan sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhn bersama yang bersifat kebendaan atau tanggung jawab.

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 1 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Ukuran Koperasi

Menurut Sitio (2001), berdasarkan omzetnya ukuran kopersi diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu koperasi besar, koperasi menengah, dan koperasi kecil: 1. Koperasi besar mempunyai omzet per tahun diatas Rp 1 Milyar. 2.

Koperasi menengah mempunyai omzet per tahun antara Rp 500 juta - Rp 1 M. 3. Koperasi kecil mempunyai omzet per tahun kurang dari Rp 500 juta.

Jenis Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 16 jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi terdiri dari lima jenis, yaitu:

1. Koperasi simpan pinjam, 2. Koperasi konsumen, 3. Koperasi produsen, 4. Koperasi pemasaran, 5. Koperasi jasa.

Keberadaan koperasi yang ada di banyak wilayah, dan koperasi sendiri berdiri dikarenakan kepentingan anggota koperasi yang bersangkutan, maka koperasi-koperasi ini dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Jenis Koperasi menurut fungsinya:

1).Koperasi pembelian/ pengadaan/ konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.

2). Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.

3). Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.

4). Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Setiap koperasi bisa saja mempunyai banyak fungsi, dalam artian ada koperasi yang hanya bergerak dalam satu bidang. Misal, koperasi yang bergerak dalam bidang jasa atau koperasi yang bergerak dalam bidang produksi saja. Atau bisa saja koperasi tersebut bergerak dalam dua bidang atau lebih. Misal, koperasi yang menyediakan jasa dan sekaligus menjadi produsen suatu produk. Koperasi satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (*multi purpose cooperative*).

2. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja:

1).Koperasi Primer. Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

2).Koperasi Sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan

koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi : a) koperasi pusat-adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. b) gabungan koperasi-adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. c) induk koperasi-adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi.

3. Jenis Koperasi menurut status keanggotaannya:

1).Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha.

2).Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.

Sama seperti jenis koperasi yang cenderung lebih mengikuti pada kebutuhan para anggota, untuk masalah modal, koperasi juga bergantung pada anggota koperasi tersebut. Modal koperasi berasal dari dua (2) modal sendiri atau modal mandiri dan berasal dari modal pinjaman.

4. Modal sendiri

1).Simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Jumlah simpanan pokok setiap anggota adalah sama besar. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

2).Simpanan wajib. Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan anggota dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dibayar tiap bulan. Jumlah simpanan wajib tidak harus sama untuk tiap anggota. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

3).Dana cadangan. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU). Dana cadangan berfungsi untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. (Maelani, 2011).

5. Modal pinjaman. Modal pinjaman koperasi berasal dari: 1).Anggota: 2).Koperasi lain dan/atau anggotanya; 3).Bank dan Lembaga; 4).Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; 5).Sumber lain yang sah. (UU No 25 tahun 1992 pasal 41 Tentang Perkoperasian.)

Konsep Tentang Asset

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pengertian aset secara umum menurut Siregar (2004) adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomis (*economic value*),

nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu/ perorangan. Pengertian aset yang disebutkan pada dasarnya berlaku pula pada aset yang dikuasai atau dimiliki negara berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Pengertian aset tetap

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca selain aset lancar, aset tak berwujud, aset bersejarah dan aset lainnya. Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/ pencatatan, pengukuran/penilaian dan penyajian serta pengungkapan aset menjadi fokus utama, karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Adapun karakteristik utama dari aset tetap menurut Kieso dan Weygandt (2007) adalah sebagai berikut :

1. Aset tetap biasanya diperoleh untuk digunakan dalam operasional entitas dan tidak dimaksudkan untuk dijual
2. Secara umum, aset memiliki masa manfaat yang cukup lama (biasanya beberapa tahun) dan oleh karenanya akan disusutkan selama masa manfaat tersebut.
3. Aset tetap secara fisik dapat dilihat bentuknya.

Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07). Menurut PSAP 07, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalan kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Aset tetap sering mejadi bagian utama dari aset pemerintah dan merupakan bagian signifikan dalam penyajian neraca. Aset tetap di klasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi entitas. Adapun PSAP 07 Mengklasifikasi aset tetap sebagai berikut :

1. Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesing dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara,

monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada diatasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan

5. Aset tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk operasional pemerintah dan dalam konsisi siap pakai, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/ buku dan barang bercorak seni/ budaya/ olah raga.

6. Kontruksi dalam pekerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, itigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Pinjaman atau Kredit

Pengertian pinjaman modal menurut kamus besar bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka (1997) adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang barang dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang nenambah kekayaan dan diinterpretasikan sebagai sejumlah uangyang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis.

Menurut *Syafi'I Antonio (1999),* pinjaman adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dan suatu pinjaman juga adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.

Menurut Bank Indoneseia (1999), pinjaman adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yg sama sesuai pinjaman.

Menurut *Rukmana (2010),* pinjaman modal adalah dana yang berasal dari pemilik modal atau bank, atau pemilik saham ditambah dengan agio saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha bank.
Dalam ekonomi perkebunan disebutkan pula modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru atau komoditi perkebunan. Modal perkebunan yang berupa barang diluar tanah adalah ternak beserta kandangnya, cangkul, bajak, dan alat-alat perkebunan lain. Bibit, pupuk dan hasil hasil panen yang belum dijual. Tanaman yang masih di kebun dan lainnya *Anshori (2010)*.

Kerangka Pikir

Hubungan peubah bebas jumlah badan usaha koperasi dan jumlah perolehan pinjaman/ bantuan dana BUMN terhadap perkembangan asset dunia usaha berbadan hukum koperasi di Kota Ternate, disajikan pada gambar berikut:

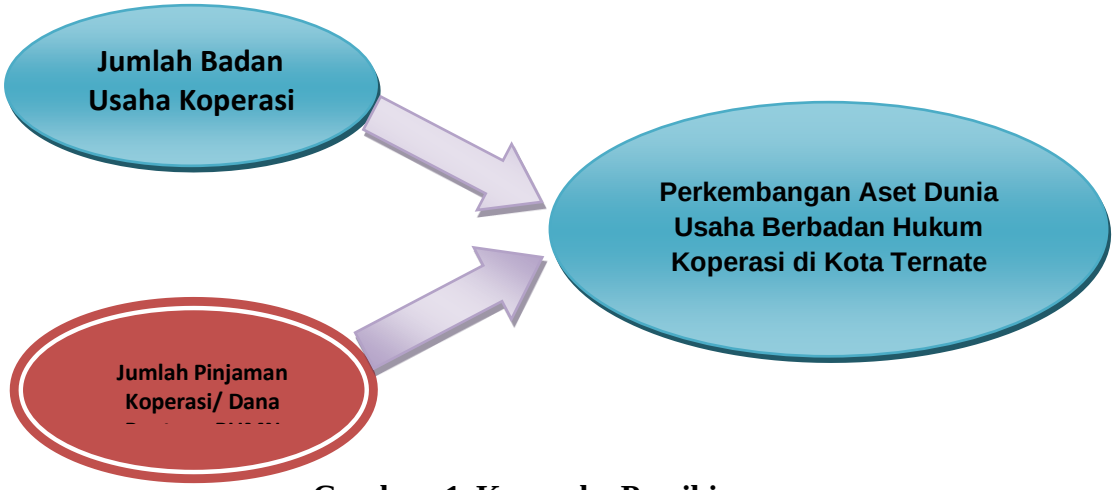

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan gambar 3.1. di atas, perkembangan aset dunia usaha berbadan hukum koperasi di Kota Ternate merupakan peningkatan harta kekayaan baik dalam wujud aset yang bersifat tidak bergerak seperti tanah, bangunan, maupun aset yang berbentuk simpanan dana pada bank, persediaan barang kegiatan pada unit usaha atau bisnis koperasi selama dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi di Kota Ternate dari tahun sekarang maupun masa lalu.
Jumlah Badan Usaha koperasi adalah wujud organisasi yang berdiri untuk tujuan bisnis. Masyarakat di Kota Ternate memilih dan menggunakan badan usaha ini karena kelebihan dan keunggulan yang dimiliki koperasi. Setiap pendirian badan usaha seperti ini akan disertai pencatatan pembukuan atas kepemilikan aset berupa setoram simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela serta partisipasi anggota dalam mengambangkan bisnis organisasinya. Sehingga hal ini akan

mencatat aset badan usaha koperasi sejak tahun awal memulai kegiatan usaha untuk mencapai tujuan usaha bersama anggotanya.

Pinjaman koperasi dan bantuan dana BUMN merupakan variabel ketiga yang mempengaruhi pertumbuhan aset badan usaha koperasi di Kota Ternate karena koperasi akan menggunakan dana yang dipinjam atau bantuan dana BUMN untuk mengembankan unit bisnis koperasi. Dengan demikian maka tercatat sebagai harta kekayaan koperasi.

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: "Diduga bahwa jumlah Badan Usaha Koperasi dan perolehan kredit oleh bisnis koperasi berpengaruh terhadap akumulasi aset koperasi di Kota Ternate".

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis adalah analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis dilakukan setelah model regresi berganda yang digunakan bebas dari pelanggaran asumsi klasik, agar hasil pengujian dapat diinterprestasikan dengan tepat. Adapun persamaan model regresi berganda dapat ditampilkan sebagai berikut :

$$Y = B0 + B1X1 + B2\ X2 + \varepsilon$$

(Dumairi, 2004)

Dimana: Y = Nilai aset koperasi, X1= Jumlah Badan Hukum Koperasi, X2 = Nilai pinjaman dana pada bank dan dana bergulir BUMN, B0 = Intersip (konstanta), B1, B2 = Koefesien Regresi, ε = Kesalahan penganggu *(distrubance)*

Defenisi Operasional Variabel

Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan defenisi operasional sebagai berikut:

Tabel 1. Defenisi Operasinal Variabel

No	Variabel	Defenisi Operasional	Satuan Ukuran
1	Nilai Aset (Y)	Nilai aset dalam bentuk tanah, bangunan, persediaan barang (stock) dan nilai simpanan pada bank yang merupakan milik koperasi-koperasi dalam kurun waktu satu tahun yang memiliki tempat usaha di Kota Ternate.	Rupiah (Rp)
2	Jumlah Badan Hukum Koperasi (X1)	Jumlah Badan Hukum Koperasi yang sah secara hukum berdomisili di Kota Ternate dalam kurun waktu satu tahun	Rupiah (Rp)

3	Nilai Pinjaman (kredit) (X2)	Dana pinjaman yang diperoleh organisasi koperasi baik untuk pengembangan usaha maupun bentuk bantuan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk keperluan pengembangan usaha koperasi yang ada di Ternate	Rupiah (RP)

Sumber: Data Diolah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Koperasi Pada Perekonomian Kota Ternate

Dalam perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kota Ternate, koperasi menjadi bagian penting yang berkontribusi nyata terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Sampai pada tahun 2018 koperasi memiliki wadah yang nyata untuk kegiatan ekonomi bagi masyarakat Kota Ternate seperti yang ada pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 2. Jumlah Badan Usaha Koperasi dan Sebarannya Menurut Jenis Di Kota Ternate pada Tahun 2018

Kecamatan	KUD	Non KUD	Koperasi Karyawan	Lainnya
Pulau Ternate	8	-	1	17
Moti	-	-	-	5
Pulau Batang Dua	-	-	-	6
Pulau Hiri	1	-	-	4
Ternate Barat	-	-	-	-
Ternate Selatan	3	7	3	37
Ternate Tengah	2	20	5	53
Ternate Utara	2	8	1	35
Jumlah	11	35	10	157

Sumber: Kantor Dinas Koperasi dan UKM

Berdasarkan data pada tabel 2, peran koperasi di Kota Ternate dapat ditunjukan dengan berapa indikator penting diantaranya adalah sebagai berikut; sampai pada tahun 2018 jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di Kota Ternate sebanyak 14 Badan Hukum (BH), koperasi Non KUD 35 BH, Koperasi Karyawan (KOPKAR) 10 unit BH dan jenis Badan Hukum koperasi lainnya sebanyak 157 BH koperasi. Sehingga jumlah total Badan Hukum organisasi koperasi di Kota Ternate pada tahun 2018 sebanyak 216 Badan Hukum. Sementara itu, berdasarkan indikator lainnya maka jumlah anggota koperasi yang tercatat adalah sebanyak 12.948 orang yang terdiri atas 7.162 adalah laki-laki dan 5.785 adalah perempuan. Walaupun secara wilayah Kota Ternate masih sulit terverifikasi aset sebagai data awal namun untuk tingkat provinsi Maluku Utara berdasarkan rilis laporan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara tercatat nilai volume usaha koperasi mencapai pada tahun 2017 mencapai Rp 190.672.798.000,-.

Perkembangan Nilai Asset Badan Usaha Koperasi Di Kota Ternate

Selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 nilai asset badan usaha koperasi di Kota Ternate mengalami perkembangan secara bertahap sebagaimana yang tertera pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Perkembangan Nilai Asset Badan Usaha Koperasi di Kota Ternate Tahun 2009 sampai Tahun 2019

Tahun	Nilai Asset Badan Usaha Koperasi (RP)
2009	16.983.706.914,-
2010	31.089.185.067,-
2011	45.635.135.637,-
2012	50.882.244.861,-
2013	52.994.609.125,-
2014	62.289.892.271,-
2015	63.406.025.946,-
2016	68.385.002.104,-
2017	65.634.448.672,-
2018	67.503.966.952,-

Sumber: Kantor Dinas Koperasi & UKM Kota Ternate

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan telah terjadi peningkatan secara signifikan nilai asset badan usaha koperasi selama sembilan tahun berturut dari tahun 2009 sampai pada tahun 2018. Selama sembilan tahun tersebut nilai asset badan usaha koperasi di kota Ternate mengalami peningkatan sebesar 297,5 %. Dari peningkatan nilai asset tersebut maka dapat dilihat secara rata-rata nilai asset koperasi mengalami peningkatan sebesar 33,1 % per tahun.

Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 48 % dan tahun 2014 sebesar 42 %. Kenaikan yang tinggi terjadi pada kedua tahun tersebut didorong oleh faktor iklim bisnis yang relatif stabil pada tahun 2011 dan adanya kebijakan pemerintah untuk mendorong peran UKM termasuk koperasi dalam mendorong kesempatan kerja pada tahun 2014 pada masa awal pemerintah Jokowi. Oleh karena itu, semangat pemerintah tersebut kemudian diikuti dengan implementasi kebijakan mengajak perbankan untuk melayani kredit usaha UKM dan usaha mikro termasuk koperasi melalui penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Perkembangan Jumlah Badan Usaha Koperasi Di Kota Ternate

Pentingnya keberadaan organisasi koperasi sebagai wadah untuk melakukan kegiatan ekonomi tersebut maka masyarakat Kota Ternate secara antusias mendirikan badan usaha koperasi untuk menunjang aktifitas mereka. Perkembangannya pada setiap tahun nampak terus bertambah. Hal ini dapat kita lihat melalui tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4. Perkembangan Jumlah Badan Usaha Koperasi di Kota Ternate Tahun 2009 sampai Tahun 2019

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Badan Usaha Koperasi	261	274	280	293	299	300	307	309	311	314

Sumber: Kantor Dinas Koperasi & UKM Kota Ternate

Berdasarkan data pada tabel tersebut, kita dapat melihat adanya peningkatan yang terus terjadi pada jumlah badan usaha koperasi di Kota Ternate antara tahun 2009 sampai tahun 2018. Secara keseluruhan jumlah badan usaha koperasi pada tahun 2018 adalah sebanyak 314 unit badan usaha. Jumlah tersebut telah meningkat sebanyak 53 unit badan usaha koperasi atau 20,3 % dari tahun 2009 sebanyak 261 unit badan usaha. Dari peningkatan tersebut maka jumlah badan usaha koperasi selama 9 tahun telah meningkat rata-rata sebanyak 2,2 % setiap tahun.

Perkembangan Nilai Pinjaman pada Bank dan Dana Bergulir BUMN oleh Koperasi

Selama tahun penelitian, peneliti mendapatkan informasi bahwa koperasi terus mendapat pinjaman pada bank dan dana bergulir BUMN pada setiap tahun. Nilai-nilai pinjaman koperasi tersebut terakumulasi pada tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 5. Perkembangan Nilai Akumulasi Pinjaman pada Bank dan Dana Bergulir BUMN pada Badan Usaha Koperasi di Kota Ternate Tahun 2009 sampai Tahun 2019

Tahun	Nilai Akumulasi Pinjaman Bsnis ank & Dana BUMN Oleh Koperasi (RP)
2009	583.700.000,-
2010	589.180.000,-
2011	535.100.000,-
2012	682.200.000,-
2013	694.600.000,-
2014	809.800.000-
2015	866.000.000,-
2016	880.000.000,-
2017	894.000.000,-
2018	903.000.000,-

Sumber: Kantor Dinas Koperasi & UKM Kota Ternate

Berdasarkan pada tabel 5. kita dapat melihat nilai pinjaman koperasi pada bank dan dana bergulir BUMN pada setiap tahun berfluktuasi. Tetapi secara kuantitas nilai pinjaman pada tahun 2018 (Rp. 903.000.000,-) mengalami peningkatan yang cukup besar jika dibandingkan dengan nilai pinjaman pada tahun 2009 (Rp. 583.700.000,-). Peningkatan nilai pinjaman badan usaha koperasi pada perbankan dan dana BUMN ini dapat dibaca sebagai peningkatan faktor kepercayaan kedua institusi tersebut kepada badan usaha koperasi di Kota Ternate. Karena dengan faktor

kepercayaan ini pihak perbankan bersedia memberikan pinjaman kepada badan usaha koperasi untuk menggenjot bisnisnya.

Hasil Analisis

Koefisien Regresi

Hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan SPSS 16 menghasilkan indikator sebagaimana yang disajikan pada data di bawah ini. Hasil perhitungan menggunakan tingkat signifikansi 10 % maka diperoleh persamaan regresinya sebagai berikut:

Nilai Asset = 169.556,010 + 7.139.126 BH Kop + 167.451,637 NP

Dari data ini maka dapat dijelaskan koefisien regresi sebagai berikut:

B0 = 169.556,010 artinya bila tidak ada pengaruh semua variabel independen (Badan Hukum Koperasi dan nilai pinjaman) maka pertambahan nilai asset badan usaha koperasi yang ada di Kota Ternate adalah sebanyak Rp169.556,010,-

B1 = **7.139.126** artinya bila terjadi penambahan jumlah badan usaha koperasi sebanyak 1 unit Badan Hukum koperasi tanpa ada pengaruh dari variabel pinjaman pada bank atau dana bergulir BUMN maka akan terjadi peningkatan nilai asset badan usaha koperasi yang ada di Kota Ternate sebesar Rp. **7.139.126,-**.

B2 = **167.451,637** artinya bila jumlah nilai pinjaman pada Bank dan dana bergulir BUMN bertambah sebesar Rp.1,000,- tanpa ada pengaruh dari variabel Badan Hukum Koperasi maka akan terjadi peningkatan nilai asset badan usaha koperasi yang ada di Kota Ternate sebesar Rp. **167.451,637,-**

Nilai R= 0,980 hal ini menunjukan adanya hubungan yang sangat kuat dan positif antara variabel dependen dan variabel independen. Sedangkan nilai *Adjusted R Square* adalah 0,895. Nilai ini menunjukan bahwa variasi perubahan nilai variabel dependent (nilai asset koperasi) dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diteliti (Badan Hukum Koperasi dan nilai pinjaman)) sebesar 89,5 %, sedangkan sisanya sebesar 10,5 % adalah pengaruh faktor-faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1). Multikolinearitas

Berdasarkan indikator yang diperoleh pada hasil SPSS terlampir dapat diketahui bahwa ketiga variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini ditunjukan oleh adanya nilai telerance Badan Hukum Koperasi sebesar 0,571, dan nilai pinjaman sebesar 0,670. Nilai-nilai tersebut menunjukan besaran yang tidak kurang dari 0,10, maka model ini dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas. Demikian juga nilai VIF Badan Hukum Koperasi sebesar 8.245, dan nilai pinjaman sebesar 8,245.

2). Autokorelasi

Berdasarkan indikator yang diperoleh pada hasil SPSS terlampir dapat diketahui bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,792. Nilai ini berada pada: 1,65 < 2,35. Secara teori menurut Suliyanto (2011) berarti dapat disimpulkan tidak outokorelasi. Oleh karena itu, hal ini tidak dapat dibuat kesimpulan bahwa persamaan regresi ini tidak terjadi outokorelai tersebut.

3). Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar *scatterplot* pada gambar lampiran dapat diketahui bahwa sebaran titik cukup merata baik di atas mupun dibawah angka nol pada sumbu badan hukum koperasi dan nilai pinjaman kemudian tidak berkumpul atau berpola gelombang. Dengan demikian juga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Hasil Uji Parsial atau Uji Secara Individual (t-test)

Berdasarkan hasil uji-t pada statistik menunjukan bahwa, variabel Badan Hukum Koperasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai asset badan usaha di Kota Ternate. Hal ini ditunjukkan dengan nilai uji t-hitung (9,445) > t-tabel (1,762) pada taraf keyakinan 10 % karena nilai signifikansi pada hasil perhitungan sebesar 0,008 yang berarti lebih kecil dari 0,10 (0,008 < 0,10). Sedangkan variabel nilai pinjaman berpengaruh signifikan terhadap nilai asset badan usaha koperasi di Kota Ternate. Keadaan ini dapat dijelaskan melalui indikator nilai t-hitung (7,179) > t-tabel (1,782) pada taraf keyakinan 10 % karena nilai signifikansi pada hasil perhitungan statistik sebesar 0,003 yang berarti bahwa lebih kecil dari 0,10, (0,009 < 0,10).

Hasil Uji Simultan atau Uji Serempak (F-Test)

Hasil uji simultan atau serempak atas variabel independent terhadap variabel dependent pada penelitian ini berhasil memperoleh indikator bahwa nilai F-hitung (25,048) > F-tabel (3,49) serta memiliki nilai signifikansi 0,004. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Badan Hukum Koperasi dan nilai pinjaman berpengaruh secara serempak dan signifikan terhadap nilai asset badan Usaha Koperasi di Kota Ternate.

Pembahasan Hasil Analisis

1). Pengaruh Jumlah Badan Hukum Koperasi Terhadap Nilai Asset Koperasi

Berdasarkan hasil olah data statistik dengan program SPSS 16 menunjukan bahwa variabel jumlah Badan Hukum Koperasi berpengaruh signifikan terhadap nilai asset badan usaha koperasi di Kota Ternate. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Nurul Mubarak di daerah Kabupaten Banyuasin (2015), Penta (2015). Penelitin Nurul menemukan hasil bahwa peningkatan jumlah badan usaha koperasi mampu mendorong peningkatan nilai asset badan usaha koperasi di Kabupaten Banyuasin. Sedangkan Penta menemukan

hasil yang sejalan, dimana peningkatan jumlah badan usaha akan mendorong peningkatan asset dalam pengelolaan koperasi dan usaha kecil di Kota Semarang.
Dengan demikian maka, peningkatan nilai-nilai asset badan usaha koperasi di Kota Ternate sebagai efek dari peningkatan jumlah badan usaha akan mampu memperkuat kontribusi koperasi dalam perekonomian daerah di Kota Ternate. Karena makin baik asset koperasi akan meningkatkan ketahanan organisasi koperasi sebagai salah satu sarana untuk ikut mendorong ekonomi masyarakat melalui anggota koperasi maupun non anggota koperasi. .

2). Pengaruh Nilai Pinjaman pada Bank dan BUMN Terhadap Nilai Asset Koperasii

Berdasarkan hasil olah data statistik dengan program SPSSi 16 menunjukan bahwa variabel nilai pinjaman koperasi pada bank dan dana bergulir BUMN ternyata berpengaruh signifikan terhadap nilai asset badan usaha koperasi di Kota Ternate. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Nurul Mubarak di daerah Kabupaten Banyuasin (2015), Penta (2015) di Kota Semarang dan Sobari (2016) di Kabupaten Tual. Penelitin Nurul menemukan hasil bahwa pemanfaatan dana Comunity Development yang baik mampu mendorong peningkatan asset badan usaha koperasi di Kabupaten Banyuasin. Sedangkan Penta menemukan hasil yang sejalan dimana peningkatan pengelolaan dana pinjaman perbankan secara berhati-hati akan mendorong peningkatan asset dalam pengelolaan koperasi dan usaha kecil di Kota Semarang. Sobari menemukan hasil bahwa pelaku-pelaku industri rumahan di Kabupaten Tual mampu menggenjot peningkatan nilai asset usaha mikro setelah memperoleh pinjaman dana bergulir melalui program kemitraan BRI cabang Tual dengan pelaku usaha mikro dan pemerintah daerah.

Kesimpulan

1. Peningkatan jumlah badan usaha koperasi yang terjadi di Kota Ternate memberi kontribusi pengaruh terhadap peningkatan asset badan usaha koperasi. Meningkatnya badan usaha koperasi merupakan wujud dari semangat masyarakat Kota Ternate untuk menjadikan koperasi sebagai wadah untuk melakukan kegiatan ekonomi. Wadah-wadah ini berfungsi untuk melindungi, membina dan menggerak potensi pelaku-pelaku ekonomi yang terhimpun sebagai anggota koperasi. Sehingga keberadaan mereka mampu membuat terobosan dalam mengembangkan unit-unit bisnis yang pada hasilnya mampu meningkatkan asset badan usaha koperasi di Kota Ternate.
2. Pinjaman dana pada bank-bank dan pengelolaan dana bergulir BUMN secara berhati-hati oleh badan usaha koperasi untuk kebutuhan pembiayaan dan ekspansi bisnis koperasi di Kota Ternate mampu mendorong peningkatan nilai asset badan usaha koperasi. Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah

permodalan yang paling klasik selain mengandalkan sumber dana dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota maka koperasi dapat mengatasinya dengan melakukan pinjaman pada lembaga perbankan atau [2]mengelola dana bergulir yang disediakan oleh BUMN dengan kesepakan yang saling menguntungkan antara badan usaha koperasi dan BUMN. Sarana ini menjadi sebuah pendorong yang cukup kuat dalam meningkatkan nilai asset koperasi di Kota Ternate.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka. Jakarta.

Anshori, A.G. 2010. Perjanjian I*slam dalam Indonesia, Konsep Regulasi dan Implementasi*, ed. 1 cet 2. Jogyakarta.

Dumairy. 2004. *Matematika Ekonomi.* Cetakan Kelima. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Hidayati, Wahyu dan Harjanto, Budi. 2003. Konsep Dasar Penilaian Properti. BPFE, Yogyakarta.

Hendrajogi. 2012. *Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek*. PT. Radja Grafindo Persada. Jakarta.

Kieso & Weygandt. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit FE-UI. Jakarta.

Maelani, K. 2001. *Peran Koperasi Dalam Ekonomi Kerakyatan.* Penelitian Ilmiah, Universitas Gunadarma. Jakarta.

Mubarrok, N. 2015. *Analisis Pengaruh Jumlah Badan Usaha dan Dana Community Development Terhadap Perkembangan Aset Badan Usaha Koperasi di Kabupaten Banyuasin.* Sumatera Selatan.

Mubiyarto,1996. *Pengantar Ekonomi Pertanian.* LP-FUI, Jakarta

Rukmana, A.M. 2010. *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris diindonesia*, Edisi.1. Cetakan.1.Jakarta.

Siregar, Doli. D, 2004, *Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Standar Penilaian Indonesia (SPI), 2007, mengacu kepada International Valuation Standards (IVS), KPSPI, Jakarta.

Syafi'I Antonio, M. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insane press. Jakarta.

Sitro, A. 2011. *Koperasi; Teori dan Praktek*, Penerbit Erlangga. Jakarta.

Widarjono, Agus. 2005. *Ekonometrika, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta Indonesia

Widyartati, P. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Aset Badan Usaha Koperasi di Kota Semarang*, Semarang